

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tentu berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik dari tahun ke tahun, tidak terkecuali Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses atau upaya menuju perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk keseluruhan sistem dalam suatu negara, seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pendidikan, pertahanan, teknologi, kelembagaan, hingga budaya. Sementara itu, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan demi mencapai kondisi yang lebih baik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tumbel et al., 2018).

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari berbagai indikator makro ekonomi, salah satunya yaitu pengangguran, yang didefinisikan oleh Sukirno dalam Ishak (2018) sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja berkeinginan bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, dalam mengukur pengangguran tersebut digunakan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang didefinisikan oleh BAPPEDA DIY sebagai rasio jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja di suatu daerah dalam persen (Noviatamara et al., 2019).

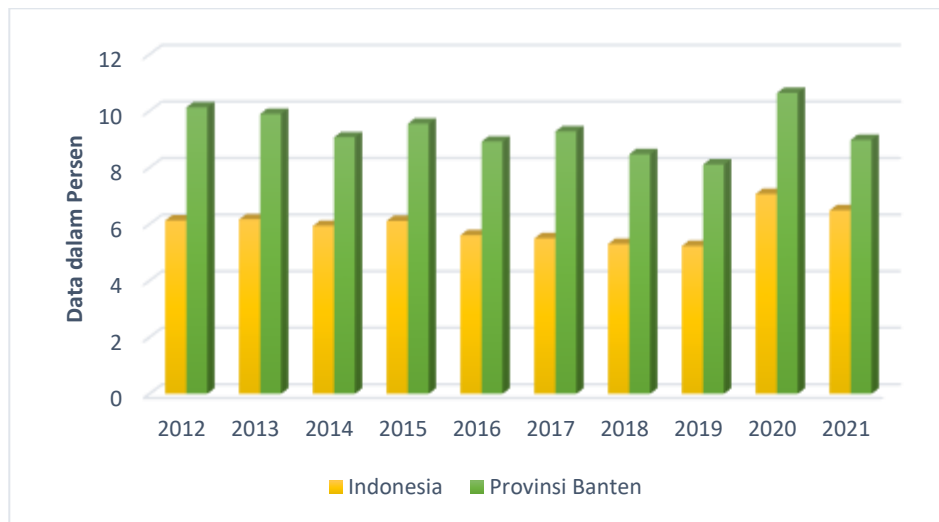
Pengangguran dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga persentase penyerapan tenaga kerja menjadi kecil dan sisanya berada pada kondisi menganggur. Seseorang yang berada dalam kondisi menganggur tanpa

penghasilan akan mengurangi konsumsi, sehingga apabila terjadi dalam waktu yang lama akan berdampak buruk pada kondisi psikologis penganggur dan keluarga (Sukirno, 2016 dalam Yuniarti, 2022). Hal ini juga dapat mendorong persoalan sosial dan ekonomi lainnya seperti kemiskinan dan peningkatan kriminalitas. Oleh sebab itu, pengangguran merupakan isu serius yang perlu dikurangi dan dijaga pada tingkat yang wajar demi stabilitas nasional suatu negara.

Berdasarkan data dari World Bank (2022), tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dari sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan dari pemerintah masih belum optimal dan pengangguran masih memerlukan perhatian lebih dalam pengentasannya.

Tingginya pengangguran di Indonesia tentu tidak terlepas dari kontribusi tiap provinsi yang ada. Provinsi Banten merupakan salah satu di antaranya yang memiliki masalah terkait tingginya tingkat pengangguran terbuka dan bahkan menempati peringkat ke-3 tertinggi di skala nasional pada tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten juga selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional selama kurun waktu 2012-2021 serta perkembangannya cenderung fluktuatif, seperti yang disajikan pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2021



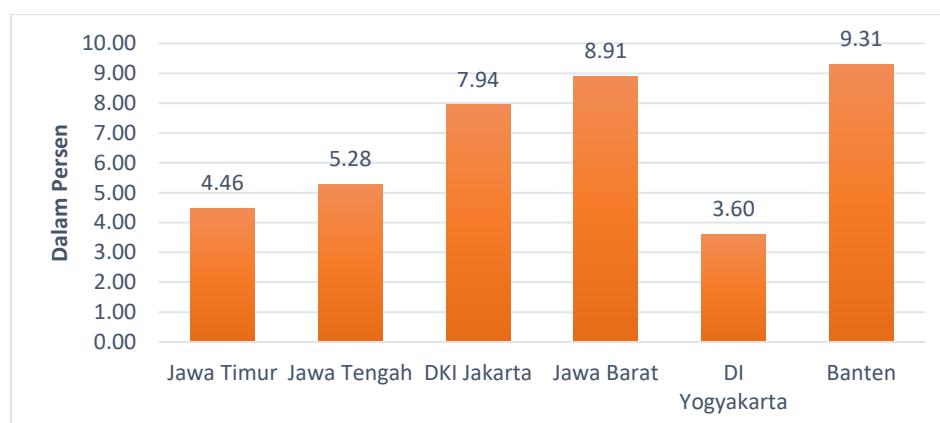
Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022b)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 di atas, Provinsi Banten menunjukkan masalah terkait masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang melebihi tingkat nasional selama 10 tahun berturut-turut. Selama periode tahun 2012-2019, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten cenderung membentuk tren menurun hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,11%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam menanggulangi pengangguran membuahkan hasil yang cukup baik.

Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai titik tertinggi selama 10 tahun terakhir dengan persentase sebesar 10,64%, sebelum akhirnya berhasil menurun pada tahun 2021 menjadi 8,98%. Meningkatnya pengangguran secara drastis pada tahun 2020 merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian di Provinsi Banten.

Seriusnya permasalahan pengangguran di Provinsi Banten juga dapat dilihat dari lingkup Pulau Jawa yang notabene merupakan sentral perekonomian nasional, di mana rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten berada pada posisi tertinggi dibandingkan 5 provinsi lainnya dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu mencapai 9,31% yang dapat dilihat pada gambar berikut (Data diolah dari BPS, 2023).

Gambar 1.2 Grafik Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Periode 10 Tahun Terakhir (2012-2021)



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022b)

Kondisi ini semakin menguatkan alasan masih diperlukannya upaya ekstra dalam penanganan isu pengangguran di Provinsi Banten dan juga diperlukan pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat pengangguran terbuka berkaitan dengan beberapa indikator ekonomi lain, di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

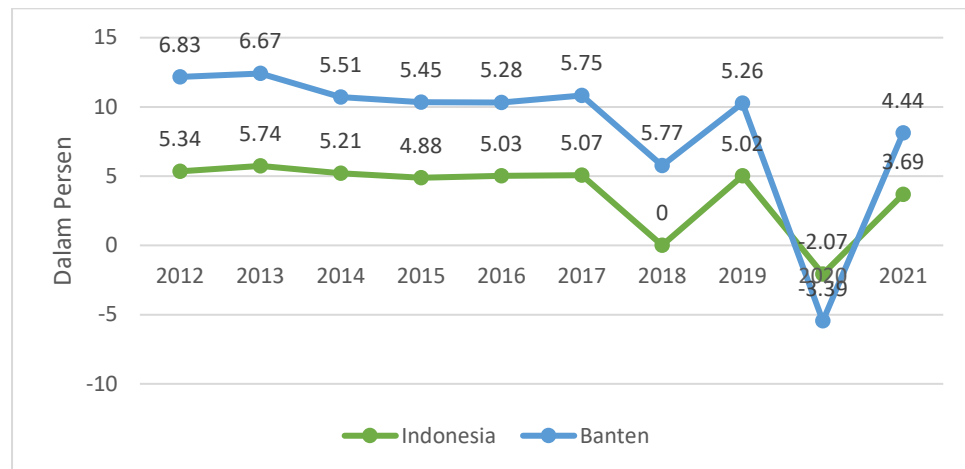
Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur pertumbuhan output, tetapi juga mengindikasikan sejauh mana pendapatan masyarakat

dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu (Tumbel et al., 2018). Pertumbuhan ekonomi yang pesat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di wilayah tersebut berkembang dengan baik. Hukum Okun menjelaskan bahwa ada hubungan negatif atau berbanding terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, hingga akhirnya menurunkan pengangguran (Mankiw, 2003 dalam Yacoub & Firdayanti, 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jirang et al. (2018) dan Radila et al., (2021) yang sama-sama menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Di sisi lain, penelitian Yacoub & Firdayanti (2019) memberikan temuan yang berbeda, di mana hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ialah tidak signifikan. Berikut disajikan data mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dibandingkan dengan tingkat nasional selama periode tahun 2012-2021.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dapat dikatakan cukup tinggi karena menempati peringkat ke-8 nasional pada tahun 2021. Adapun data perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2012-2021



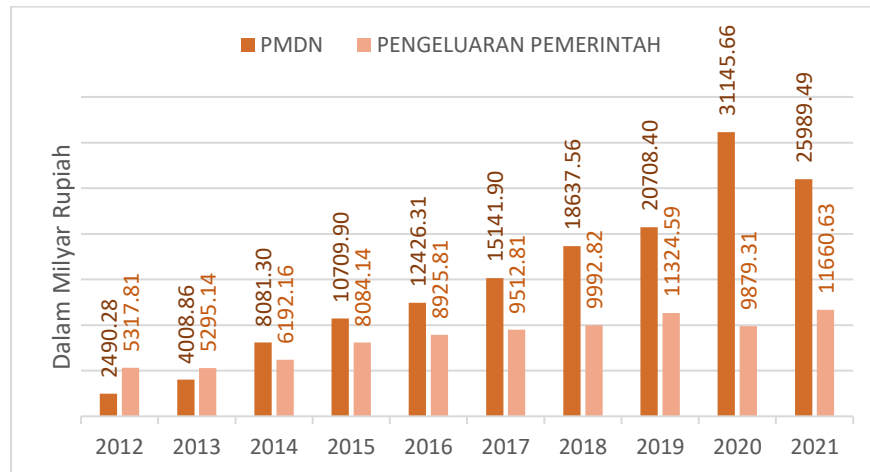
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar 1.3, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama 10 tahun terakhir selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional kecuali pada tahun 2020. Provinsi Banten mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dan berada pada titik terendahnya pada tahun 2020 dengan persentase pertumbuhan sebesar -3,39% akibat pandemi. Kemudian pada tahun 2021, berbagai program dan stimulus yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten berhasil memperbaiki kondisi perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan hingga mencapai 4,44%. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Banten ini justru diikuti oleh tingkat pengangguran terbuka yang tinggi pula, sehingga berkebalikan dengan teori yang ada.

Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengangguran di antaranya ialah investasi dan pengeluaran pemerintah. Perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten menunjukkan tren yang cukup positif dengan kecenderungan naik,

meskipun terdapat sedikit penurunan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4 Grafik Nilai Realisasi PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012-2021



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022a; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2017, 2020, 2022)

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2012-2020, dari yang semula hanya 2.490,28 Milyar Rupiah hingga mencapai 31.145,66 Milyar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten berhasil membangun iklim investasi yang kondusif dari tahun ke tahun. Hanya saja, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga nilai realisasi PMDN menjadi 25.989,49 Milyar Rupiah.

Baik pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran berkaitan erat dengan besarnya investasi yang ditanamkan pada daerah tersebut. Menurut Sukirno yang dikutip oleh Buana et al. (2018), investasi merupakan pembelanjaan penanaman modal untuk membeli sarana produksi yang akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pernyataan ini didukung oleh teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa

diperlukan investasi sebagai syarat tercapainya *steady growth* atau pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang (Murni, 2006 dalam Tumbel et al., 2018).

Mendorong tingkat investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan investasi tersebut akan mendorong pertumbuhan bisnis atau pendirian industri, serta memberikan *supply* teknologi baik dalam bentuk produksi atau permesinan sehingga menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan pengangguran (Lusiana, 2012 dalam Helvira & Rizki, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran. Bukti empiris diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Yasa (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran sesuai penelitian Silaban & Siagian (2021). Meskipun demikian, hasil yang berbeda juga diperoleh dari penelitian lainnya, diantaranya yaitu penelitian Tumbel et al. (2018) yang menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tidak pula signifikan terhadap pengangguran menurut temuan Helvira & Rizki (2020).

Selain investasi, terdapat unsur lain yang tidak kalah penting dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi pengangguran, yaitu pengeluaran pemerintah. Teori Keynes menyatakan

bahwa diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Hakib, 2019). Selain itu, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa akan menciptakan lapangan kerja, contohnya pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, irigasi, maupun pengembangan pendidikan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesempatan kerja dan pada akhirnya mengurangi pengangguran (Jirang et al., 2018).

Hal ini didukung dengan bukti empiris dari penelitian Buana et al. (2018) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara terkait hubungan dengan pengangguran, penelitian Jirang et al. (2018) dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai objek juga membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Meskipun demikian, ditemukan pula bukti empiris yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran dalam penelitian Tumbel et al. (2018).

Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Banten disajikan pada gambar 1.4 di atas, di mana terlihat bahwa Provinsi Banten mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan kisaran 5.295,14 - 11.660,63 Milyar Rupiah selama periode tahun 2012-2021. Meskipun cenderung naik, perkembangan ini belum dapat dikatakan stabil karena pengeluaran pemerintah Provinsi Banten mengalami penurunan pada tahun 2013 meskipun tidak terlalu signifikan.

Begitu pula pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 12,77% dari tahun 2019 yang semula mencapai 11.324,59 Milyar Rupiah menjadi hanya 9.879,31 Milyar Rupiah, sebelum kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi 11.660,63 Milyar Rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Banten sebagai objek penelitian ini masih memiliki permasalahan terkait tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif dan selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional, serta rata-ratanya selama sepuluh tahun terakhir merupakan yang tertinggi di lingkup Pulau Jawa.

Naik-turunnya tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari pengaruh indikator-indikator makro ekonomi Provinsi Banten lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Pada kenyataannya, kenaikan pertumbuhan ekonomi, realisasi PMDN, dan pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Penelitian-penelitian terdahulu yang menguji keterkaitan antara variabel-variabel tersebut juga masih memiliki perbedaan hasil atau terdapat *research gap*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah PMDN secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
2. Apakah pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
4. Apakah PMDN secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten?
5. Apakah pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PMDN secara langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PMDN secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam menganalisis pengaruh PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menggunakan data *time series* dalam kurun waktu 15 tahun (2007-2021) di Provinsi Banten dengan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen, PMDN dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam lingkup ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengaruh PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat

pengangguran terbuka dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Provinsi Banten, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, terutama berkaitan dengan PMDN, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka di daerah lain atau dengan variabel yang berbeda.